



Bias atau Realita: Analisis Wacana Konflik Timor Timur dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Pasca Orde Baru

Azril Azifambayunasti,^{1*} Annisaa Khansa Labibah,¹ Raisha Hafandi,² Athifa Raissa Putri,¹ Linda Tiya Wati,¹ Shendy Dyah Pramesti¹

¹Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

²Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: azril.azifambayunasti.fis@um.ac.id, annisaa.labibah.fis@um.ac.id,

raisha.hafandi.fis@um.ac.id, athifa.raissa.2507318@students.um.ac.id,

linda.tiya.2107316@students.um.ac.id, shendy.dyah.2407318@students.um.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 22-10-2025, Revised: 01-12-2025, Accepted: 01-12-2025, Published: 02-11-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana konflik Timor Timur yang ditampilkan dalam buku teks sejarah pasca Orde Baru serta hal-hal yang melatarbelakangi representasi wacana tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah: pertama, dalam kurun waktu 1975-1999, militer Republik Indonesia melakukan okupasi (sering disebut integrasi oleh pemerintah Indonesia saat itu) di Timor Timur dan terlibat konflik yang menyangkut pelanggaran HAM. Kedua, konflik tersebut merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang seharusnya disampaikan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu untuk digali bagaimana kurikulum dan buku teks sejarah memproduksi dan mereproduksi wacana terkait konflik Timor Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembaharuan kurikulum pendidikan sejarah yang lebih kritis dan terbuka bagi narasi-narasi marginal. Hasilnya, pemaparan konflik Timor Timur dalam buku teks sejarah pasca Orde Baru cenderung menempatkan pemerintah Indonesia sebagai aktor utama dan mengesampingkan akar permasalahan yang kompleks. Pemaparan narasi yang berimbang dirasa belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik wacana yang berkembang di masyarakat bahwa konflik antara Timor Timur dan Indonesia hanya sebatas wilayah provinsi yang memisahkan diri dari republik. Padahal di baliknya, ada permasalahan melibatkan pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan secara adil.

Kata Kunci:

analisis wacana; buku teks sejarah; Timor Timur

Abstract

This research aims to analyze the discourse of the East Timor conflict presented in post New Order history textbooks. It will also explore the background of its presentation. This research is departing from the facts that: first, During the 1975-1999, the Indonesian military occupied East Timor (often called integration by the Indonesian government) and was involved in a conflict related to human rights violations. Second, the conflict is part of Indonesian history that should be conveyed and become a lesson. Thus, it is necessary to explore how the curriculum and history textbooks produce and reproduce discourse related to the East Timor conflict. This research is expected to be a consideration in the process of updating the history curriculum to be more critical and open to marginalized narratives. The result show that the presentation of the East Timor conflict in post-New Order history textbooks tends to position the Indonesian government as the primary actor and ignores the complex roots of the

problem. The balanced narrative is deemed unacceptable to the wider public. This is inextricably linked to the prevailing discourse that the conflict between East Timor and Indonesia was limited about the separation from the republic. However, the underlying issues involving human rights violations have never been resolved justly.

Keywords:

discourse analysis; East Timor; history textbooks



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Timor Timur atau Timor Leste yang terletak di bagian timur Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, mempunyai sejarah yang berbeda dengan wilayah bagian Republik Indonesia karena ia merupakan bekas koloni Portugal (Fox, 2007; Naziya, 2025). Pada 28 November 1975, pasca Revolusi Anyelir yang mengakhiri imperium Portugal (Prakasa, 2004), Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaannya, tapi sembilan hari kemudian diinvasi oleh militer Republik Indonesia (Molnar, 2010) dan dianeksasi menjadi provinsi ke-27. Invasi tersebut dikenal dengan kode Operasi Seroja. Dari pihak Indonesia, operasi dilancarkan dengan dalih membendung pengaruh komunis (Fretilin) yang akan memengaruhi stabilitas politik Indonesia dan Asia Tenggara (Wahyuni & Setiawan, 2023). Berbagai organisasi HAM dan gereja Katolik memperkirakan lebih dari 200 masyarakat Timor Timur tewas selama invasi dan okupasi Indonesia, mulai dari Operasi Seroja, tragedi Santa Cruz, sampai dengan peristiwa pasca referendum 1999. Para akademisi bahkan menyebut peristiwa ini sebagai genosida (Nevins, 2005).

Dalam kurun waktu 1975-1999, tentara Fretilin dan pembebasan Timor Timur terus terlibat perang dengan militer Republik Indonesia. Bahkan pada 12 November 1991, para peziarah di Pemakaman Santa Cruz, Dili, ditembak dan dibantai oleh militer, hingga lebih dari 200 orang terbunuh. Peristiwa tersebut menjadi sorotan dunia, tapi para petinggi militer tetap bersikeras bahwa tindakan itu memang diperlukan (Silove, 2000). Tidak hanya pembantaian, hampir setengah populasi Timor Timur mengalami pemindahan paksa (Robinson, 2008). Pelanggaran HAM yang melibatkan militer Republik Indonesia ini mendapatkan perhatian para intelektual, seperti George Aditjondro (Aditjondro, 1994) dan Abdurrahman Wahid yang menyampaikan permintaan maaf dalam kunjungan ke Dili pada tahun 2000 (Hearman, 2023). Sampai saat ini, rekonsiliasi masih terus dilakukan, terutama oleh Komnas HAM (Latuhaarhary, 2024). Keterlibatan militer dalam konflik Timor Timur tidak hanya sebatas di ranah politik, tapi juga di hampir segala urusan publik, bahkan klinik-klinik kesehatan di Timor Timur dalam kurun waktu tersebut terasosiasi dengan pihak militer (Sissons, 1997). Krisis politik dalam negeri dan krisis ekonomi kemudian mengakhiri pemerintahan Suharto pada Mei 1998. Suksesornya, B. J. Habibie kemudian menawarkan referendum pada masyarakat Timor Timur dan hasilnya lebih banyak yang memilih untuk merdeka. Merespon hal tersebut, milisi pro otonomi dan militer Indonesia melancarkan serangan dengan membakar gedung-gedung dan mengusir masyarakat ke Timor Barat, sebelum kemudian Dili diambil alih oleh pasukan PBB (Schulze, 2001).

Kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999 seringkali dinarasikan sebagai kegagalan pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga persatuan. Dalam berita yang diterbitkan oleh laman resmi RRI pada Agustus 2024, bahasan terkait merdekanya Timor Timur ditampilkan dengan judul “Timor Timur Lepas dari NKRI, 25 Tahun Silam” (Kristono, 2024). Begitu pula dengan artikel yang dipublikasikan di laman CNN Indonesia berjudul “Bagaimana Nasib Timor Leste setelah 21 Tahun Lepas dari RI?” (CNN Indonesia, 2023). Judul-judul semacam itu masih sering muncul di publik dan menunjukkan tendensi bahwa Indonesia kehilangan Timor Timur, seolah mengabaikan fakta bahwa masyarakat Timor Leste merasa diopresi oleh militer Republik Indonesia selama 24 tahun. Lalu, bagaimana konflik Timor Timur direpresentasikan dalam penulisan sejarah nasional, yang kemudian direfleksikan dalam kurikulum dan buku teks? Selama ini, penulisan historiografi nasional sarat akan kepentingan nasionalisme (Sulistiyono, 2016), sehingga pemerintah Indonesia cenderung ditampilkan sebagai pihak yang benar. Kurikulum dan buku teks sejarah sebagai refleksi dari *the official history* kemudian menjadi sebuah alat yang paling utama untuk membentuk dan mempengaruhi pemahaman kolektif generasi muda dan masyarakat karena penulisannya disesuaikan dengan kepentingan sosio-politik (Saefudin et al., 2024). Penulisan buku teks sejarah juga seringkali menjadi medan pertempuran narasi dan kepentingan (Psaltis et al., 2017). Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri, bahkan buku teks sejarah juga telah menjadi sarana politik ideologi dan pengendalian mentalitas kolektif di banyak negara (Van Nieuwenhuyse & Valentim, 2018).

Kurikulum pendidikan sejarah yang nasionalistik dan militeristik pernah dijalankan di Indonesia pada masa pemerintahan Suharto. Pada masa itu, buku teks sejarah secara terang-terangan menjadi alat hegemoni. Pasca reformasi 1998, kritik terhadap monopoli sejarah yang dilakukan rezim Orde Baru banyak muncul ke permukaan (Arta, 2012). Namun, saat Kurikulum 2004 diterapkan, buku teks sejarah menuai protes karena menyajikan perspektif lain dari peristiwa kontroversial, Gerakan 30 September 1965 (Ahmad, 2016). Hal tersebut menunjukkan bagaimana negara seolah belum siap untuk menyampaikan narasi sejarah secara jujur, padahal menurut Freire (2005), seharusnya proses pendidikan adalah proses membebaskan dan menjadikan peserta didik sebagai individu yang mempunyai pemikiran kritis, tidak serta merta menelan segala pengetahuan yang diterima. Peristiwa yang melibatkan militer Republik Indonesia di Timor Timur merupakan bagian dari sejarah yang tidak seharusnya disimpan rapat, melainkan perlu untuk disampaikan dalam pembelajaran sejarah. Seperti halnya pemerintah Australia yang telah memasukkan sejarah masyarakat Aborigin dan Selat Torres dalam kurikulum (Price, 2015), juga pemerintah Jerman yang dalam buku teks sejarahnya telah memuat narasi Holocaust (Van Berkel, 2017).

Saat ini, dalam kerangka Kurikulum Merdeka, mata pelajaran sejarah di jenjang sekolah menengah atas dan sederajat menjadi mata pelajaran umum dengan fokus pada materi sejarah nasional. Dalam kurikulum dan buku teks, pembahasan terkait Timor Timur umumnya disajikan di kelas XII, atau dalam Kurikulum Merdeka termasuk dalam sajian materi fase F akhir. Narasi tersebut merupakan suatu wacana atau *discourse* yang dapat dianalisis terkait bagaimana ia direpresentasikan dalam kurun waktu tertentu. Namun, wacana konflik dan kekerasan yang melibatkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan peristiwa Timor Timor dalam buku teks sejarah masih jarang ditemukan risetnya. Analisis wacana

dalam buku teks sejarah Indonesia telah banyak dilakukan terhadap representasi peristiwa-peristiwa sejarah kontroversial, tapi untuk analisis spesifik terhadap konflik Timor Timur baru ditulis oleh Saefudin, et al. (2024) dengan judul *Discourse Analysis of Conflict and Resolution in History Textbooks: Representations of the Referendum in Indonesia*. Dengan demikian, penting untuk diketahui bagaimana buku teks sejarah menampilkan wacana terkait konflik Timor Timur.

Berangkat dari realita tersebut, penulis melakukan analisis terhadap buku teks sejarah yang terbit pasca Orde Baru, terkait bagaimana buku-buku tersebut menampilkan dan membahas wacana konflik Timor Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis wacana, menggali proses produksi serta pemaknaan guru dan peserta didik terhadap konflik Timor Timur, serta melacak konteks sosial yang melatarbelakangi representasi wacana. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana konflik dan kekerasan di Timor Timur yang melibatkan pemerintah Indonesia direproduksi melalui kurikulum dan buku teks, khususnya pada periode pasca Orde Baru. Dengan demikian, hasil tersebut dapat menjadi alternatif solusi untuk mendorong pembaharuan pembelajaran sejarah yang lebih berimbang serta pendidikan yang lebih kritis dan membangun.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, yang bertujuan mengungkap bagaimana dominasi diberlakukan dan direproduksi melalui teks (Van Dijk, 2001), serta bagaimana teks menampilkan relasi kuasa yang tidak setara (Munfarida, 2014). Van Dijk memandang wacana mempunyai tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks, sehingga analisis harus dilakukan pada tiga dimensi tersebut. Pertama, pada dimensi teks, yang dianalisis adalah bagaimana struktur teks yang meliputi topik, skema, latar, detil, maksud, pra-anggapan, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, metafora, dan ekspresi digunakan untuk membawa makna tertentu. Kedua, pada dimensi kognisi sosial, analisis dilakukan terhadap kognisi individu yang menjadi produsen dan konsumen wacana melalui *depth interview*. Ketiga, dalam dimensi konteks yang dianalisis adalah kondisi sosial politik yang berkembang dalam masyarakat terkait wacana tertentu melalui studi arsip dan literatur (Eriyanto, 2001).

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman analisis teks berdasarkan teori Van Dijk, pedoman wawancara, dan kuesioner. Analisis dilakukan terhadap empat buku teks sejarah, di antaranya yaitu: 1) Buku Sejarah SMA untuk Kelas XII Kurikulum 2004 terbitan ESIS, ditulis oleh Magdalia Alfian, Nana Nurliana Soeyono, dan Sudarini Suhartono; 2) Buku Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA Kurikulum 2006 (KTSP) terbitan CV. Grahadi – Kementerian Pendidikan Nasional, ditulis oleh Sh. Musthofa, Suryandari, dan Tutik Mulyati; 3) Buku Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis oleh Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti, dan Susanto Zuhdi; dan 4) Buku Sejarah SMA/MA Kelas XII Kurikulum Merdeka terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ditulis oleh Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Aan Ratmanto. Analisis kognisi sosial dilakukan terhadap empat guru SMA di Kota Malang dan 50 responden kuesioner berstatus siswa dan masyarakat umum, terkait bagaimana mereka memaknai wacana tentang Timor Timur dari pembelajaran sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Timor Timur dalam Buku Teks Sejarah

Pembahasan tentang Timor Timur tidak ditemukan secara spesifik dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2004 (Alfian et al., 2006), baik di Bab 5 – Indonesia Pada Masa Orde Baru maupun di Bab 6 – Indonesia Pada Era Reformasi. Namun, pada sub sub bab berjudul Agenda-Agenda Utama B. J. Habibie yang merupakan bagian dari Bab 6, disebutkan pada paragraf pertama, “...masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia...” sebagai salah satu dari lima bidang yang menjadi konsiderasi utama pemerintahan Habibie. Pada bagian *Key Point* juga disebutkan, “Di masa kepemimpinannya, B. J. Habibie dihadapkan pada persoalan-persoalan disintegrasi...”.

Perbedaan cukup terlihat pada buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2006 (Musthofa et al., 2009). Dalam buku ini, pembahasan tentang Timor Timur pertama kali muncul di halaman 47 pada sub sub bab berjudul Kondisi Sosial dan Politik Bangsa Indonesia Setelah 21 Mei 1998 yang merupakan bagian dari Bab II – Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi. Teks pada bagian ini menarasikan proses referendum, dengan pihak yang banyak dinarasikan sebagai subjek melalui penggunaan kalimat aktif adalah pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat “Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden B. J. Habibie telah menawarkan pilihan, yaitu pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam Negara Kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia” (Paragraf 1), kemudian “Pengalaman lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadikan pemerintah lebih waspada...” (Paragraf 3), dan kalimat selanjutnya yang menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan konflik Aceh dan Papua dengan memberikan otonomi khusus.

Penjelasan peran pemerintah dengan kalimat-kalimat utama dalam teks ini juga diiringi dengan penjelasan yang menegasikan pihak Timor Timur dan wilayah lain yang dianggap bermasalah. Pada satu kalimat, peran penduduk Timor Timur dinarasikan dalam kalimat pasif, “Jajak pendapat diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur...” (Paragraf 2). Pada paragraf ketiga, teks fokus pada penjelasan tentang bagaimana wilayah-wilayah seperti Aceh dan Papua terus berupaya untuk lepas meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Hal tersebut tampak pada kalimat, “Meskipun begitu, masih saja terjadi usaha memisahkan diri dari NKRI...” dan “Penyelesaian konflik seperti itu sebenarnya tidak dikehendaki pemerintah, namun ada saja oknum yang memancing di air keruh sehingga menimbulkan ketegangan”. Paragraf keempat juga menegaskan soal tindakan pemerintah yang represif sebagai bentuk reaksi atas keinginan untuk memisahkan diri, seperti tampak pada kalimat, “Keinginan sebagian rakyat untuk merdeka telah menyebabkan pemerintah bertindak keras. Apalagi setelah pengalaman Timor Timur...”, meskipun di akhir kalimat diberi penjelasan bahwa tindakan pemerintah semacam operasi militer menyengsarakan warga sipil.

Pada sub sub bab ini, secara keseluruhan, penjelasan tentang Timor Timur disertai dengan penjelasan tentang potensi disintegrasi di wilayah-wilayah lain pasca referendum, dan penegasan bahwa tindakan-tindakan pemerintah memiliki alasan yang kuat, yaitu menjaga persatuan. Selain pada sub sub bab tersebut, Timor Timur kembali muncul dalam kolom Rangkuman poin 7 di halaman 54, “Kesalahan besar yang dilakukan pemerintahan B. J. Habibie dalam menjalankan reformasi di

Indonesia adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI". Pilihan kata dalam kalimat tersebut menunjukkan bagaimana kemerdekaan Timor Timur disimpulkan sebagai sebuah kehilangan yang sangat disayangkan dan kesalahan besar pemerintah Indonesia. Sub sub bab yang terdiri dari lima paragraf narasi ini didukung dengan foto dengan nuansa hitam putih yang menggambarkan jajak pendapat di Timor Timur. Foto terletak di sebelah kanan atas pada awal sub sub bab.

3. Kondisi Sosial dan Politik Bangsa Indonesia Setelah 21 Mei 1998

Perubahan politik di Indonesia sejak bulan Mei 1998 merupakan babak baru bagi penyelesaian masalah Timor Timur. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie telah menawarkan pilihan, yaitu pemberian otonomi khusus kepada Timor Timur di dalam Negara Kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia. Melalui perundingan yang disponsori oleh PBB, di New York, Amerika Serikat pada tanggal 5 Mei 1999 ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia, Portugal, dan PBB untuk melakukan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur.



Sumber: Encarta Encyclopedia

Gambar 2.4 Jajak pendapat di Timor Timur

Gambar 1. Penggunaan gambar dalam penarasian wacana Timor Timur di buku Kurikulum 2004

Sumber: Musthofa et al. (2009)

6. Reformasi yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie, antara lain pemberian amnesti pada para tahanan dan narapidana politik, kebebasan pers, dan pendirian partai-partai politik untuk menghadapi pemilu yang dipercepat.
7. Kesalahan besar yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie dalam menjalankan reformasi di Indonesia adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Gambar 2. Contoh penarasian wacana Timor Timur dalam buku Kurikulum 2006

Sumber: Musthofa et al. (2009)

Dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2013 (Abdurakhman et al., 2018), narasi Timor Timur kembali disajikan dengan spesifik, tetapi dengan penarasian yang lebih detail dan kronologis, dimulai dari sub bab berjudul Integrasi Timor Timur di halaman 136 yang merupakan bagian dari Bab IV – Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998). Dalam sub bab tersebut, wacana terkait Timor Timur dijelaskan secara runtut mulai dari latar belakangnya yang berkaitan dengan Perang Dingin. Pihak Timor Timur beberapa kali dinarasikan dengan kalimat aktif, contohnya dalam kalimat "...ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia..." (Paragraf 4). Namun, pemerintah Indonesia tetap menjadi subjek utama yang mendominasi dalam sub bab ini. Contohnya, pada kalimat "Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan 'Operasi Seroja' pada Desember 1975." (Paragraf 6) dan "...pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia..." (Paragraf 7).

Dalam menarasikan tindakan pemerintah Indonesia, beberapa kalimat diberi keterangan penjelas bahwa pihak yang dimaksud adalah pihak militer, seperti tampak pada kalimat "Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak

langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer).” (Paragraf 2) dan “Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor-Timur yang berada di ‘halaman belakang’ jatuh ke tangan komunis” (Paragraf 4). Sub bab ini juga menarasikan keterlibatan pemerintah Indonesia di Timor Timur sebagai tindakan reaktif atas keinginan pihak Timor Timur sendiri, serta mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia. Meskipun demikian, pada bagian akhir sub bab, dijelaskan bahwa keterlibatan pemerintah Indonesia di Timor Timur juga menimbulkan permasalahan. Sub bab ini juga dilengkapi dengan gambar arsip berita tentang referendum di bagian awal sub bab (Halaman 136) dan gambar masyarakat Timor Timur yang berdemonstrasi menginginkan integrasi (Halaman 138). Seluruh gambar ditampilkan dengan nuansa hitam putih.

Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung “Proklamasi Balibo” yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia.

Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat (AS) yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung.

Gambar 3. Contoh penarasian wacana Timor Timur dalam buku Kurikulum 2013

Sumber: Abdurakhman et al. (2018)



Gambar 4.11 Demonstrasi masyarakat Timor-Timur yang menginginkan integrasi

Gambar 4. Contoh penggunaan gambar dalam penarasian wacana Timor Timur pada buku Kurikulum 2013

Sumber: Abdurakhman et al. (2018)

Pada sub bab berjudul Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru, wacana Timor Timur kembali disinggung. Dalam narasi tersebut, peristiwa Santa Cruz 1991 turut disebut dalam deretan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, meskipun tidak disertai dengan penjelasan yang lebih detail. Wacana Timor Timur kembali dijelaskan dalam sub sub bab tersendiri berjudul Pelaksanaan Referendum Timor Timur di halaman 158. Pada bagian awal, dengan tetap diposisikan sebagai subjek, pemerintah Indonesia kembali ditegaskan melakukan aksi di tahun 1975 karena didorong oleh kemauan warga Timor Timur sendiri, meskipun tidak mendapat pengakuan internasional. Bahkan, penjelasan tersebut juga disertai dengan detail terkait

bagaimana pemerintah Indonesia memberikan banyak hal dan berkorban untuk membangun wilayah Timor Timur. Di sisi lain, pihak Timor Timur dan pihak internasional disebut tidak pernah memberikan tanggapan positif (Paragraf 1) dan selalu memojokkan di forum internasional, sehingga pemerintah terpaksa menyelesaikannya dengan cara yang dikehendaki masyarakat internasional (Paragraf 2).

Pada paragraf keempat, proses referendum dijelaskan dengan memposisikan rakyat Timor Timur sebagai subjek, seperti tampak pada kalimat “Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999...”, meskipun setelahnya, yang menjadi subjek tetap pemerintah Indonesia. Pada sub sub bab ini, terdapat juga *highlight* instruksi untuk peserta didik mendiskusikan pendapat terkait kebijakan referendum. Wacana Timor Timur kembali muncul pada pembahasan terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada masa pemerintahan Megawati (Halaman 172), dimana lepasnya dua pulau tersebut disebut sebagai pukulan setelah peristiwa Timor Timur sebelumnya. Dalam sub sub bab berjudul Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi (Halaman 217-218), wacana Timor Timur juga disinggung sebagai salah satu faktor yang mendorong Habibie dan Abdurrahman Wahid berupaya keras mengembalikan citra Indonesia di mata internasional pasca reformasi.

Dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum Merdeka (Safitry et al., 2022), wacana Timor Timur dibahas pada sub sub bab berjudul Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Aspirasi Politik (Halaman 163) yang merupakan bagian dari Bab 4 – Indonesia Masa Reformasi. Pembahasan dalam sub sub bab ini lebih fokus pada proses referendum di Timor Timur, ditampilkan dalam *highlight* tersendiri dengan judul *Viva Historia – Referendum dan Nasib para Eks Pengungsi Timor Timur* (Halaman 164), serta dilengkapi gambar berwarna yang menunjukkan terjadinya proses referendum. Pemerintah Indonesia tetap dinarasikan sebagai subjek dalam kalimat aktif, contohnya “...pemerintah Indonesia menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur” (Paragraf 1). Penjelasan ini juga dilengkapi dengan detail suasana, seperti tampak pada kalimat “Referendum ini dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dalam suasana tenang dan damai.” (Paragraf 1), dan “Suasana demokratis dalam Referendum 1999 tersebut menunjukkan adanya kebebasan politik dan berekspresi.” (Paragraf 2). Di sini, dijelaskan pula bagaimana pasca referendum, beberapa masyarakat Timor Timur yang pro integrasi melakukan eksodus besar-besaran ke wilayah Nusa Tenggara Timur.



Gambar 5. Contoh penarasian wacana Timor Timur dalam buku Kurikulum Merdeka

Sumber: Safitry et al. (2022)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa wacana Timor Timur yang dinarasikan dalam buku teks sejarah pasca Orde Baru seringkali menampilkan pemerintah Indonesia sebagai aktor utama melalui penggunaan kalimat-kalimat aktif dalam penarasiannya. Melalui penggunaan kalimat aktif dalam suatu narasi, dapat dilihat pihak mana yang dipandang penting dengan selalu ditempatkan di awal kalimat sebagai subjek (Eriyanto, 2001). Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga sering disertai dengan penjelasan lebih lanjut dan detil. Hal ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk kontrol informasi. Dalam hal ini, informasi yang menguntungkan salah satu pihak akan ditampilkan lebih jelas, dan lengkap. Sementara itu, informasi yang tidak menguntungkan tidak terlalu ditampilkan, atau hanya ditampilkan secara implisit (Eriyanto, 2001).

Penarasian wacana Timor Timur dalam buku teks sejarah juga dilengkapi dengan elemen grafis, yang mana hal tersebut juga dapat dimaknai sebagai kecenderungan penulis teks terkait apa yang lebih mereka tekankan dalam narasi. Salah satu contohnya, dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2013, narasi yang membahas wacana Timor Timur disertai dengan foto para demonstran yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Gambar tersebut seolah menjadi penegasan bahwa tindakan pemerintah Indonesia di Timor Timur mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Eriyanto (2001), bahwa penggunaan elemen grafis menunjukkan penekanan produsen teks pada hal-hal yang dianggap penting. Van Dijk (1998) juga mengungkapkan bahwa teks yang didukung dengan grafis bertujuan untuk mengontrol perhatian serta menunjukkan informasi yang dianggap penting oleh penulis.

Teks yang menunjukkan kecenderungan memihak pada pemerintah Indonesia dalam penarasian wacana Timor Timur ini merupakan cermin masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya bisa menyampaikan narasi sejarah dengan berimbang dan kritis, serta cenderung mengorientasikan pembelajaran sejarah untuk kepentingan nasionalisme (B. R. Anderson, 2006). Van Dijk (1994) kemudian menyatakan perlunya sebuah kerangka yang dapat menjembatani teks sebagai wacana dengan konteks sosial masyarakat, dan hal tersebut adalah kognisi sosial. Kognisi sosial akan mengungkap bagaimana suatu teks dipengaruhi oleh konteks sosial sehingga memberikan kontribusi dalam proses reproduksi dan legitimasi kekuatan sosial.

Di Balik Narasi dan Bagaimana Ia Dimaknai

Mengapa buku teks sejarah dari kurikulum yang berbeda masih mempunyai kesamaan dalam menarasikan wacana Timor Timur? Wacana dalam buku teks sejarah diproduksi melalui kesadaran, pengetahuan, dan prasangka penulis atas suatu peristiwa. Pihak yang melakukan produksi teks bukan pihak yang netral, melainkan sudah mempunyai berbagai macam pengalaman serta nilai dan ideologi tertentu. Dalam penulisan buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2006 (KTSP), seperti yang dijelaskan Utami (2012) dalam tesisnya, penulis pertama sudah berupaya untuk menampilkan narasi sejarah yang netral, tapi ia mendapatkan pesan dari penerbit untuk tidak terlalu menjelek-jelekan Orde Baru. Ia juga menegaskan berkali-kali bagaimana tim penulis berupaya menyajikan narasi sejarah dengan bahasa yang mudah dipahami, mengingat narasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Penarasian wacana Timor Timur dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2006 (KTSP) yang lebih menekankan pada proses referendum dan peran pemerintah dalam menjaga persatuan, dapat disimpulkan sebagai produk dari penulisan narasi yang berorientasi pendidikan sesuai konteks pada era itu. Hal tersebut juga merupakan pengaruh dari bagaimana penulis masih berada dalam bayang-bayang bahwa menulis sejarah tentang Orde Baru dalam perspektif lain adalah hal yang tabu.

Proses penulisan buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2013 yang menarasikan wacana Timor Timur dengan lebih detail dan kronologis serta menempatkan pemerintah Indonesia masih sebagai subjek, juga dipengaruhi oleh proses produksi yang dilakukan oleh penulis. Menurut Azifambayunasti (2023) dalam tesisnya, penulis pertama menyatakan bahwa proses penulisan buku kelas XII cukup banyak pertimbangan. Buku kelas XII sempat mendapatkan protes karena desain sampulnya yang menyertakan tokoh komunis, sehingga diganti dengan ilustrasi para presiden Indonesia, dengan alasan netralitas. Ia juga menjelaskan bahwa menyajikan sejarah kontemporer untuk kepentingan pendidikan ini cukup menantang. Pertama, beberapa pelaku sejarah kontemporer masih hidup. Kedua, penyampaian sejarah harus diorientasikan pada kepentingan pendidikan, utamanya yaitu penanaman karakter. Berdasarkan keterangan tersebut, maka wacana Timor Timur yang dinarasikan dalam buku teks sejarah kelas XII Kurikulum 2013 sangat dipengaruhi oleh kepentingan penulis dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penyusunan.

Dalam buku teks sejarah Kurikulum Merdeka, proses penulisan konten juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan. Menurut wawancara dengan salah satu penulis, Indah Utami pada 13 Agustus 2025, materi yang disajikan dalam buku teks sejarah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari waktu penulisan, proses diskusi dan koordinasi yang panjang, pertimbangan terkait respon publik, hingga faktor ekonomi. Terkait penulisan buku teks sejarah kelas XII, Indah mengungkapkan bahwa para penulis telah berupaya untuk menyajikan narasi sejarah yang tidak militeristik, memaparkan kompleksitas peristiwa yang kontroversial seperti G30S, serta memotret narasi soal disintegrasi dari dua sisi.

Terkait penarasian Timor Timur yang lebih fokus pada proses resolusi, Utami lebih lanjut menjelaskan bahwa awalnya penulis ingin menyajikan bagaimana pemerintah Indonesia melakukan pendudukan ke wilayah Timor Timur. Namun, para penelaah menyarankan untuk lebih hati-hati dan mempertimbangkan suasana

kebatinan masyarakat yang disebut belum siap dengan penarasian semacam itu. Bahkan, sempat ada wacana untuk mengaitkan pembahasan Timor Timur dengan menarik lebih ke belakang, ke periode sebelum kedatangan bangsa Barat, untuk memberikan penegasan bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia. Namun, karena penulis lebih ingin menyajikan narasi yang berimbang dan kritis, maka dipilihlah pendekatan kemanusiaan, sehingga pembahasan hanya mengulas tentang proses referendum.

Buku teks sejarah Kurikulum Merdeka telah memberikan banyak perubahan, terutama pada pembahasan tentang peran perempuan dan masyarakat sipil. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakang penulis yang merupakan akademisi progresif dan tergabung ke dalam Komunitas Sejarah Perempuan. Begitu juga dengan para penelaah, baik penelaah materi maupun penelaah dari segi pendidikan. Namun, wacana Timor Timur baru bisa dinarasikan dengan pendekatan kemanusiaan karena dianggap masih terlalu sensitif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh trauma terhadap persekusi yang pernah dialami salah satu penelaah di awal reformasi. Dari segi pendidikan, suasana kebatinan masyarakat juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan, karena buku teks yang diterbitkan harus menghindari hal-hal yang berpotensi viral.

Dalam pembelajaran sejarah, wacana Timor Timur dalam buku teks juga direproduksi oleh guru dan dimaknai oleh peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat guru yang masih aktif mengajar di empat sekolah menengah atas di Kota Malang pada 8-11 Juli 2025, diketahui bahwa wacana Timor Timur selalu disinggung dalam pembelajaran meskipun materi di kelas XII sangat padat. Pembahasan ini lebih sering dijadikan topik diskusi, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sumber dari luar buku teks dan menyimpulkan hasilnya. Guru-guru ini telah membuka ruang bagi pembelajaran sejarah Timor Timur yang lebih kompleks dan kritis, meskipun di sisi lain, mereka tidak selalu menggunakan buku teks utama dalam mengajarkan materi tersebut. Lalu, bagaimana selama ini peserta didik menerima wacana tentang Timor Timur?

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh mayoritas responden berusia 18-30 tahun, yang berarti merupakan pengguna Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka, mereka tahu informasi umum terkait Timor Timur dan hubungannya dengan Indonesia. Informasi tersebut mereka dapatkan dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang disampaikan oleh guru, tapi hampir separuh responden tidak mengetahui narasi Timor Timur yang disajikan dalam buku teks sejarah. Mayoritas responden juga menganggap peristiwa Timor Timur sebagai bagian penting dalam sejarah Indonesia, dan berharap supaya sudut pandang masyarakat Timor Timur lebih banyak dibahas, sehingga akan jelas alasan mengapa Timor Timur memilih untuk merdeka. Meskipun demikian, masih ada beberapa responden yang memaknai wacana Timor Timur dalam sejarah Indonesia sebagai peringatan untuk menjaga persatuan, seperti tercermin pada beberapa kalimat responden berikut: 1) "Peristiwa dimana rakyat Timor Timur ingin merdeka, sehingga ingin lepas dari Indonesia membentuk negara sendiri"; 2) "Timor timur dulunya merupakan bagian dari Indonesia, kemudian memisahkan diri dan berdiri sendiri menjadi sebuah negara. Hal ini menyebabkan banyak daerah lain yang ingin memisahkan diri dari Indonesia juga, seperti mengikuti Timor Timur".

Proses penyusunan buku teks serta bagaimana wacana Timor Timur direproduksi dan diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran memberikan gambaran bahwa sebenarnya telah muncul kesadaran akan pentingnya penarasian sejarah yang jujur dan berimbang dalam konteks pendidikan. Namun, perlu untuk ditinjau lebih luas lagi terkait bagaimana konteks sosial atau wacana tentang Timor Timur dalam sejarah Indonesia dimaknai masyarakat luas hingga saat ini, sehingga narasi yang ditampilkan dalam ruang-ruang resmi semacam buku teks sejarah belum bisa sepenuhnya jujur dan terbuka. Seperti yang dijelaskan Eriyanto (2001), analisis pada konteks sosial akan berkaitan dengan praktik kekuasaan yang tidak jauh dari dominasi atau kekuatan yang melakukan kontrol demi tujuan-tujuan tertentu.

Diskursus Timor Timur Pasca Orde Baru

Pasca referendum, kondisi Timor Timur tidak stabil. Perekonomian memburuk, harga di pasaran melonjak tinggi, dan banyak sarana prasarana rusak akibat kerusuhan yang terjadi selama referendum berlangsung. Hasil referendum tidak menjadi titik balik Timor Timur menjadi negara yang damai, karena kerusuhan tetap terjadi di mana-mana (Suartika & Liana, 2015). Pihak militer Indonesia kemudian menggeser strategi dengan mempersenjatai kelompok milisi pro integrasi. Meskipun terdapat kaum pro pemerintah yang menganggap lepasnya Timor Timur sebagai bentuk pengkhianatan terhadap persatuan Republik Indonesia, beberapa tetap percaya bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bentuk dari rencana yang diorganisasi dan direstui oleh negara (Boro, 2014). Dalam upaya penyelesaian konflik ini, para akademisi dan aktivis HAM memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dengan membentuk tim investigasi independen yang mengumpulkan bukti dan kesaksian atas keterlibatan aparat dalam mendukung milisi.

Perjuangan tersebut akhirnya sedikit menemukan titik terang. Seperti termuat dalam Tais Timor (2000), Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Dili pada 31 Januari 2000. Dalam kunjungannya, Gusdur berpidato dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Gusdur juga mengatakan bahwa Timor Timur dan Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akhirnya, pada tahun 2001 disahkan Keppres Nomor 96/2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Selain itu, menyangkut pelanggaran HAM berat yang terjadi, pemerintah Timor Timur juga membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) (Sunarisasi, 2008).

Sejak saat itu, diskursus tentang Timor Timur di tengah media Indonesia cukup mengalami perubahan. Dari yang pada awalnya menyuarakan tentang narasi konflik, perlahan berubah menjadi liputan yang berfokus pada hubungan bilateral yang normal dan konstruktif. Pada pertengahan tahun 2000-an, setelah permintaan maaf Gusdur, liputan mulai fokus ke hubungan diplomatik. Seperti yang diberitakan detikNews pada 29 Januari 2005 tentang kunjungan Xanana Gusmao ke Lapas Cipinang. Liputan tersebut menyoroti bagaimana Xanana yang pernah menjadi tahanan politik kembali ke Lapas Cipinang dengan posisi sebagai presiden Timor Leste. Selain itu, kunjungan Xanana juga diberitakan sebagai misi kemanusiaan pasca tsunami Aceh (detikNews, 2005). Hal ini menunjukkan adanya narasi rekonsiliasi dan perdamaian di media. Hal tersebut tentu berbeda dengan pemberitaan pada awal periode pasca referendum, di mana media Indonesia

umumnya meliput Timor Timur dengan narasi yang sentimental, emosional, dan cenderung menggambarkan nasionalisme yang terluka. Salah satu contoh penyuaraan kekecewaan oleh media Indonesia terlihat dalam siaran terakhir Radio Republik Indonesia (RRI) di Dili, 23 September 1999. Dalam siaran tersebut, Parlin Tobing mengatakan, "Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari. Kalian yang memulai, kalian minta diakhiri". Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah (RRI, 1999).

Dalam kurun waktu 2010 sampai sekarang, pemberitaan Indonesia terkait Timor Timur cenderung lebih positif dan berfokus pada kerjasama, terutama di bidang ekonomi terkait investasi dan perdagangan yang disponsori oleh Indonesia. Salah satu contohnya seperti yang diberitakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 29 Juni 2018, dimana Indonesia disebut siap jadi mitra utama pembangunan Timor Leste. Pada berita tersebut juga diungkapkan peresmian proyek infrastruktur di Timor Leste yang didanai oleh perusahaan Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Namun, bagaimana konflik diselesaikan dan bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dalam memori kolektif masyarakat di dua negara, tetap harus menjadi pertimbangan, karena meskipun secara umum hubungan bilateral telah membaik, insiden-insiden kecil dapat memunculkan kembali trauma yang memicu ketegangan.

Bagaimana kemudian konflik Timor Timur dan pemerintah Indonesia yang menyangkut pelanggaran HAM ditindaklanjuti? Berdasarkan temuan dan hasil penyelidikan, baik dari lembaga independen di Indonesia maupun dunia internasional membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999. Bahkan, insiden tersebut juga disebut melibatkan beberapa petinggi militer Indonesia, salah satunya yaitu Wiranto (Apinino, 2019). Menilik kasus tersebut, pemerintah Indonesia mendapat desakan internasional untuk bertanggung jawab. Komnas HAM kemudian membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur (KPP HAM Timor Timur) pada 23 September 1999. KPP HAM Timor Timur memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama yang terjadi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999. Kasus-kasus tersebut meliputi penyerangan rumah Uskup Belo, penyerangan Diosis Dili, pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro, penyerangan rumah Manuel Carrascalao, pembakaran rumah penduduk di Maliana, penyerangan kompleks Gereja Suai, pembunuhan di Polres Maliana, pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Lospalos, dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan (Setyadi & Saputra, 2022).

Pada Februari 2000, KPP HAM Timor Timur menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Kasus ini diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang kemudian dibentuk pada tahun 2001. Dalam pengadilan ini, 18 terdakwa yang merupakan anggota militer, polisi, dan sipil, didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Enam terdakwa dinyatakan bersalah, tapi semuanya masih bebas sambil menunggu banding atas putusan tersebut (Linton, 2004). Pada akhirnya, 16 orang diantaranya divonis bebas, dan hanya dua orang yang menjalani hukuman penjara, yaitu Abilio Soares yang merupakan mantan Gubernur Timor Timur dan Eurico Guterres, komandan milisi (Wibowo & Setyadi, 2021).

Pengadilan terkait kasus Timor Timur dipandang pihak internasional sebagai proses yang gagal. *Human Rights Watch (HRW)* menyatakan persidangan tersebut

palsu dan mendesak PBB untuk mengajui kegagalan dalam proses pengadilan serta menyelenggarakan persidangan yang kredibel. *Amnesty International* juga mengecam persidangan tersebut sebagai persidangan yang tidak jujur. Komisi HAM PBB pun menyatakan kekecewaannya terkait pelaksanaan persidangan. Begitu juga dengan Uni Eropa yang mencatat bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan laporan yang berdasar (Linton, 2004). Dalam tulisan yang diterbitkan Human Right Watch (2002), Brad Adams bahkan menyebutkan bahwa impunitas pengadilan di Indonesia memang diciptakan oleh para pejabat politik, terlihat dari realita di mana para pejabat tinggi militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM hanya menjalani pengadilan formalitas. Beberapa di antaranya justru dipromosikan untuk jabatan tertentu. Mengutip Pace et al., (2003), Timor Timur pada akhirnya memperoleh kemerdekaan tanpa mendapatkan keadilan, bahkan tanpa punya harapan bahwa mereka akan mendapatkan keadilan itu.

Jika ditarik benang merah, penarasian wacana Timor Timur yang belum bisa jujur dalam buku teks sejarah sejak periode Kurikulum 2006 (KTSP) hingga saat ini dipengaruhi oleh realita bahwa penyelesaian konflik antara Timor Timur dan Indonesia tidak pernah berakhir dengan adil. Pada akhirnya, terbentuk persepsi publik bahwa permasalahan dua negara sudah selesai, dan saat ini telah menjalin kerja sama yang konstruktif. Bersamaan dengan pemberitaan positif oleh media dari waktu ke waktu, masyarakat akhirnya lupa bagaimana pemerintah melalui militer terlibat dalam insiden kekerasan di Timor Timur selama kurun waktu 1975 hingga 1999. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibawa ke permukaan, terutama di ruang-ruang resmi seperti buku teks, muncul kekhawatiran yang besar terkait respon publik.

Selain itu, anggapan bahwa negara yang pernah melakukan opresi tidak mungkin menyampaikan sejarah yang apa adanya pada generasi muda sepertinya juga masih dipegang oleh pemilik kuasa di Indonesia. Hal tersebut seolah melukai misi nasionalisme yang selama ini dijunjung tinggi. Seperti penjelasan Bartulovic (2006), bahwa pelajaran sejarah pada hakikatnya adalah pelajaran tentang patriotisme, dan negara menggunakan sejarah untuk membentuk identitas nasional serta menjamin kesetiaan kepada bangsa dan negara. Nozaki dan Selden (2013) juga mengungkapkan bahwa di Jepang, penarasian sejarah dalam buku teks pernah dikritik oleh kementerian karena dianggap terlalu ilmiah dan kurang menampilkan spirit nasionalisme. Kesalahan negara dalam sejarahnya, pada kenyataannya masih tabu untuk disampaikan dalam pembelajaran. Mengutip Hein dan Selden (2015), narasi sejarah dalam pembelajaran pada akhirnya menjadi semacam hasil kurasi peristiwa-peristiwa pilihan, dan secara tidak langsung menginstruksikan masyarakat terkait bagaimana berpikir dan bertindak sebagai subjek suatu bangsa, dan bagaimana memandang hubungan bangsanya dengan pihak luar. Dalam konteks Indonesia dan Timor Timur, meskipun penulis buku dan guru telah mempunyai kesadaran untuk menyampaikan narasi yang jujur, pada akhirnya tetap terbentur dengan kekhawatiran terkait nasionalisme dan respon masyarakat luas terkait wacana tersebut.

Konteks sosial di mana pemberitaan positif menutupi realita kesalahan pemerintah di Timor Timur menjadi sebuah bukti dari apa yang dikatakan oleh Van Dijk (2001) bahwa konteks mencerminkan praktik kekuasaan. Pihak yang mempunyai kekuasaan akan mengendalikan tindakan dan pikiran pihak lain serta mempunyai akses dalam mengontrol wacana. Dengan kekuasaan dan akses,

menurut Van Dijk (1989), pihak tertentu akan mendapatkan sorotan dan kekuasaannya dilegitimasi oleh media. Oleh karena itu, dimensi konteks dalam proses analisis ini memberikan bukti dan gambaran bahwa wacana Timor Timur yang muncul dalam buku teks dan direproduksi dalam ruang-ruang kelas, adalah bagian dari wacana besar yang berkembang di tengah masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan

Penarasian wacana konflik Timor Timur dalam buku teks sejarah pasca Orde Baru menunjukkan bahwa teks bukan sesuatu yang netral. Pada analisis dimensi teks, wacana Timor Timur dalam buku teks cenderung menampilkan pemerintah Indonesia sebagai tokoh utama dalam narasi melalui penggunaan kalimat aktif dan detil. Pada dimensi kognisi sosial, proses produksi dan reproduksi wacana berkaitan erat dengan pengalaman, nilai, ideologi, serta pertimbangan politik penulis maupun penelaah, sehingga narasi yang dihasilkan masih dibatasi oleh suasana kebatinan masyarakat. Guru dan peserta didik kemudian mereproduksi narasi tersebut dengan pemaknaan yang beragam, mulai dari kesadaran dan kritik atas ketidakadilan hingga sebagai pelajaran menjaga persatuan. Pada dimensi konteks sosial diketahui bahwa telah ada perubahan narasi wacana Timor Timur di ruang publik, dari konflik ke hubungan yang positif, tapi masih dengan mengesampingkan pelanggaran HAM yang kenyataannya belum pernah diselesaikan secara adil. Jadi, wacana yang berkembang di tengah masyarakat luas itu lah yang mempengaruhi bagaimana wacana dalam bentuk terkecil (teks) ditampilkan dalam buku teks sejarah melalui kognisi sosial penulis dan pihak yang mereproduksinya.

Penelitian ini masih sangat perlu masukan dan perbaikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan bisa lebih memperdalam kajian pada dimensi kognisi sosial. Analisis terhadap pengalaman penulis, bagaimana guru mereproduksi wacana, serta bagaimana peserta didik dan masyarakat menerima suatu wacana perlu untuk dilakukan terhadap subjek yang lebih luas dan lengkap, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didukung oleh dana hibah internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang tahun 2025 skema Penelitian Pemula berdasarkan kontrak Nomor 24.2.237/UN32.14.1/LT/2025. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pendanaan yang telah diberikan.

Referensi

- Abdurakhman, Pradono, A., Sunarti, L., & Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor.
- Alfian, M., Soeyono, N. N., & Suhartono, S. (2006). *Sejarah SMA untuk Kelas XII*. ESIS.
- Anderson, B. R. (2006). *Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

- Apinino, R. (2019). *Wiranto Disebut Terlibat Bumi Hangus Timtim, Kini Mengurusi Papua.* <https://tirto.id/wiranto-disebut-terlibat-bumi-hangus-timtim-kini-mengurusi-papua-ehhi>. Diakses 12 September 2025.
- Arta, K. S. (2012). Kurikulum dan Kontroversi Buku Teks Sejarah dalam KTSP. *Media Komunikasi FPIPS*, 11(2), 1–15. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/459>.
- Azifambayunasti, A. (2023). *Konstruksi Gender dalam Buku Teks Sejarah (Analisis Wacana Kritis Buku Sejarah Indonesia Kelas XI dan XII Kurikulum 2013 Revisi 2017)*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Bartulovic, A. (2006). Nationalism in the Classroom: Narratives of the War in Bosnia-Herzegovina (1992–1995) in the History Textbooks of the Republic of Srpska. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 6(3), 51-72. <https://doi.org/10.1111/j.1754-9469.2006.tb00098.x>.
- Boro, L. R. (2014). Jajak Pendapat Timor Timur Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 380-388.
- CNN Indonesia. (2023). *Bagaimana Nasib Timor Leste setelah 21 Tahun Lepas dari RI?* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230929183011-106-1005350/bagaimana-nasib-timor-leste-setelah-21-tahun-lepas-dari-ri>. Diakses 12 September 2025.
- detikNews. (2005). *Xanana Nostalgia di LP Cipinang*. <https://news.detik.com/berita/d-281343/xanana-nostalgia-di-lp-cipinang>. Diakses 12 September 2025.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Fox, J. (2007). Tracing the path, recounting the past: historical perspective on Timor. In J. J. Fox & D. B. Soares (Eds.), *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor* (p. 299). ANU E Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of The Oppressed*. The Continuum International Publishing Group.
- Hearman, V. (2023). Dissent, Pro-Democracy Activism in Indonesia, and the 1991 Santa Cruz Massacre. In V. Hearman, H. Loney, M. R. Goncalves, & M. Leach (Eds.), *The Santa Cruz Massacre, 1991: Thirty Years On Proceeding of an International Research Symposium* (pp. 61–69). Swinburn University of Technology.
- Hein, L., & Selden, M. (2015). *Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States*. Routledge.
- Human Right Watch. (2002). *Justice Denied for East Timor: Indonesia's Sham Prosecutions, the Need to Strengthen the Trial Process in East Timor, and the Imperative of U. N. Action*. <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/timor/etimor1202bg.htm>. Diakses 14 September 2025.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018). *Indonesia Siap Jadi Mitra Utama Pembangunan Timor Leste*. https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_siap_jadi_mitra_utama_pembangunan_timor_leste. Diakses 14 September 2025.
- Kristono, R. (2024). *Timor Timur Lepas dari NKRI, 25 Tahun Silam*. <https://rri.co.id/lain-lain/940653/timor-timur-lepas-dari-nkri-25-tahun-silam>. Diakses 12 September 2025.
- Latuharhary, K. (2024). *Rekonsiliasi, Langkah Menuntaskan Luka Sejarah RI-Timor Leste*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/10/16/2571/rekonsiliasi-langkah-menuntaskan-luka-sejarah-ri-timor-leste.html>. Diakses 12 September 2025
- Linton, S. (2004). Unravelling the First Three Trials at Indonesia's Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor. *Leiden Journal of International Law*, 17(2), 303–361. <https://doi.org/10.1017/S0922156504001839>
- Molnar, A. K. (2010). *Timor Leste: Politics, history, and culture*. Routledge.
- Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1-19.
- Musthofa, S., Suryandari, & Mulyati, T. (2009). *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA*. CV. Grahadi.
- Naziya, I. (2025). Santa Cruz 1991: Represi Militer Indonesia di Timor Timur pada Era Orde Baru. *Forum for Social and Humanities Studies*, 1(2), 99-110. <https://journal.ptipt.id/index.php/fshs/article/view/11>.
- Nevins, J. (2005). *A Not-so-distant Horror: Mass Violence in East Timor*. Cornell University Press.
- Nozaki, Y., & Selden, M. (2013). Japanese Textbook Controversies, Nationalism, and Historical Memory: Intra-and International Conflicts. *Asia-Pacific Journal*, 11(S7), 272–298. <https://doi.org/10.1017/s1557466013025898>.
- Pace, J., Harris, S., & Bhuta, N. (2003). East Timor: Justice delayed. *Alternative Law Journal*, 28(3), 141-145.
- Prakasa, Y. (2004). *Indonesia's Annexation of East Timor (The Connection with the Carnation Revolution and the US Involvement)*. <https://www.researchgate.net/publication/237773623>. Diakses 12 September 2025.
- Price, K. (2015). *Aboriginal and Torres Strait Islander Education: An Introduction for the Teaching Profession*. Cambridge University Press.
- Psaltis, C., Carretero, M., & Čehajić-Clancy, S. (2017). History education and conflict transformation: Social psychological theories, history teaching and reconciliation. In *History Education and Conflict Transformation: Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54681-0>.
- Robinson, G. (2008). People Power: A Comparative History Of Forced

- Displacement in East Timor. In E.-L. E. Hedman (Eds.), *Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia* (pp. 87–118). Cornell University Press.
- RRI. (1999). *Siaran Terakhir RRI di Timor Timur*. Broadcast. Diakses 14 September 2025.
- Saefudin, A., Utomo, S. S., Taneo, M., Rosanawati, I. M. R., Judijanto, L., Nasri, U., Amin, M. Z., Sudarto, & Andini, S. (2024). Discourse Analysis of Conflict and Resolution in History Textbooks: Representations of the Referendum in Indonesia. *Forum for Linguistic Studies*, 6(5), 433–446. <https://doi.org/10.30564/fls.v6i5.7115>.
- Safitry, M., Utami, I. W. P., & Ratmanto, A. (2022). *Sejarah untuk SMA/MA kelas XII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Schulze, K. E. (2001). The East Timor Referendum Crisis and Its Impact on Indonesian Politics. *Studies in Conflict and Terrorism*, 24(1), 77–82. <https://doi.org/10.1080/10576100119771>.
- Setyadi, Y., & Saputra, O. (2022). Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(2), 106–115.
- Silove, D. (2000). Conflict in east timor: Genocide or expansionist occupation?. *Human Rights Review*, 1(3), 62.
- Sissons, M. E. (1997). *From one day to another: violations of women's reproductive and sexual rights in East Timor*. East Timor Human Rights Centre.
- Suartika, T., & Liana, C. (2015). Korban Jajak Pendapat di Timor Timur, 1999. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 15-24.
- Sulistiyono, S. T. (2016). “Historiografi Pembebasan”: Suatu Alternatif. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(1), 9-24. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.877>.
- Sunarisasi, S. (2008). *Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Tais Timor. (2000). *Gusdur kunjungi Timor Timur*. Tais Timor. Diakses 12 September 2025.
- Utami, I. W. P. (2012). *Wacana Ideologi Negara dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- van Berkel, M. L. (2017). *Plotlines of Victimhood: The Holocaust in German and Dutch history textbooks, 1960-2010*. Erasmus University Rotterdam.
- van Dijk, T. A. (1989). Structures of Discourse and Structures of Power. In J. A. Anderson (Ed.), *Communication Yearbook 12*. Sage Publication.
- van Dijk, T. A. (1994). Discourse and Cognition in Society. In D. Crowley & D. Mitchell (Eds.), *Communication Theory Today*. Stanford University Press.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Study*. Sage Publication.
- van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. In D. Schiffrin & et al (Eds.), *The*

- Handbook of Discourse Analysis.* Blackwell Publishers Ltd.
- Van Nieuwenhuyse, K., & Valentim, J. P. (2018). *The Colonial Past in History Textbooks: Historical and Social Psychological Perspectives*. Information Age Publishing, Incorporated.
- Wahyuni, T., & Setiawan, A. (2023). Memory of the Seroja Struggle: Memories and the Challenges of Life After Military Operations 1978–1998. In B. Melani & S. Tiwon (Eds.), *Trajectories of Memory Excavating the Past in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5793>.